

## ABSTRAK

**Syarif Hidayatulah (1123010117), “Kawin Paksa Sebagai Alasan Perceraian (*Analisis Putusan Pengadilan Agama Indramayu nomor 3071/Pdt.G/Pa.Im*)**

Kawin paksa sebagai alasan perceraian tidak disebutkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975 *jo* KHI pasal 116 yang mengatur tentang alasan-alasan perceraian. Tetapi di Pengadilan Agama Indramayu terdapat putusan yang menyebutkan bahwa kawin paksa dapat dijadikan sebagai alasan perceraian yaitu pada putusan perceraian Nomor perkara: 3071/Pdt.G/Pa.Im.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: 1) Bagaimana landasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im; 2) Bagaimana tinjauan hukum alasan perceraian karena alasan kawin paksa kaitannya dengan KHI Pasal 71 huruf F.

Penelitian ini bertolak dari pemikiran bahwa hakim dalam memutuskan perkara harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan atas asas-asas putusan yang berdasar pada keadilan. Dalam memutus perkara hakim selain menerapkan hukum yang tertulis maupun tidak tertulis, putusan hakim juga harus berdasar pada nilai-nilai kehidupan yang berkembang dimasyarakat. Sehingga selain putusan itu menciptakan rasa keadilan juga mempunyai kemanfaatan yang berkekuatan hukum tetap.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode content analisis yaitu penelitian dengan melakukan analisis terhadap data primer dan sekunder. Data primer dilakukan dengan cara mendokumentasikan putusan yang berhubungan dengan materi penelitian. Meliputi hasil wawancara pada Hakim Pengadilan Agama Indramayu, untuk memperoleh keterangan mengenai landasan dan pertimbangan hukum yang diambil dalam memutuskan perkara perceraian karena kawin paksa di Pengadilan Agama Indramayu pada tahun 2015. Sedangkan data sekunder meliputi kajian kepustakaan dan literatur-literatur yang terkait dengan materi penelitian.

Hasil dari penelitian menunjukan: 1) Landasan dan pertimbangan hukum hakim dalam memutuskan perkara perceraian Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im adalah Pasal 19 UU No.1 Tahun 1974 *jo* KHI pasal 116 huruf f yaitu antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga; 2) Kaitan perceraian karena alasan kawin paksa dengan Pasal 71 huruf f KHI dianalogikan pada KHI Pasal 72 ayat 3 yaitu perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan dengan ketentuan usia perkawinan dibawah 6 bulan. Dengan demikian, Majelis hakim Pengadilan Agama Indramayu dalam memutus perkara perceraian Nomor 3071/Pdt.G/2015/Pa.Im telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.